



Pengawasan Inspektorat Penting bagi Kalbar

PONTIANAK-Inspektorat Kalimantan Barat menggelar Rapat Koordinasi Pengawasan Daerah Tahun 2019 dan Pembahasan PKPT tahun 2020, di Aula Kantor Inspektorat Provinsi Kalbar, Rabu (6/11). Kegiatan yang dibuka secara langsung oleh Gubernur Kalbar, Sutarmidji itu, dihadiri oleh para inspektur dari Kabupaten/Kota se Kalbar. Rakor yang mengangkat tema 'APIP Kompeten Mengawal Pemerintah' tersebut, akan dilaksanakan selama dua hari 6-7 November 2019.

Kegiatan tersebut menghadirkan Inspektorat IV Kementerian Dalam Negeri, Bachtiar Sinaga. Dalam pemaparannya ia menyebutkan, pengawasan terhadap urusan pemerintah dilakukan secara berjenjang. Menurutnya, peran kepala daerah sebagai perwakilan pemerintah pusat juga sangat penting.

"Pemerintah pusat melakukan pengawasan umum dan teknis terhadap pelaksanaan urusan provinsi. Demikian juga gubernur sebagai kepala daerah, melakukan pengawasan terhadap urusan pemerintahan kabupaten/kota. Begitupun bagi bupati atau walikota juga harus mengawasi perangkat daerah di kabupaten/kota. Mereka juga melakukan pengawasan kepada pemerintah pusat," jelas dia.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalbar, Sutarmidji menyatakan komitmennya untuk



SITI/PONTIANAK POST

RAKOR: Gubernur Kalbar, Sutarmidji membuka kegiatan Pengawasan Daerah Tahun 2019 dan Pembahasan PKPT tahun 2020, yang digelar oleh Inspektorat Kalbar, Rabu (6/11).

selalu diawasi oleh inspektorat. Dia bilang, ia dan wakilnya tidak terbebas dari pemeriksaan, sehingga apabila ada kesalahan, dirinya siap untuk ditegur dan diperiksa. Ia memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi inspektorat untuk mengawasi siapa saja di jajaran pemerintahannya.

Orang nomor satu di Kalbar itu meminta inspektorat berkolaborasi dengan BPKP, serta berkonsultasi, supaya kualitas pemerintahan berjalan baik dan efektif. Dirinya menegaskan tidak akan segan-segan mencopot bawahannya bila ada temuan. "Jangan sampai ada penyimpangan lagi pada pemerintah provinsi, tata kelola pemerintahan ini harus lebih baik. Kalau APBD 2019 Kalbar masih ada temuan dari BPK maka harus bertanggung jawab, dan kepala

dinasnya saya copot," tegas dia.

Sementara itu, Ketua Panitia kegiatan, Marlina menyampaikan, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kompetensi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah atau APIP, sehingga mampu menghasilkan laporan hasil pengawasan yang berkualitas serta dapat mengawal penyelenggara pembangunan daerah agar tercapai secara efektif dan efisien, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Salah satu tugas APIP adalah pencegahan korupsi. Inspektorat dan KPK RI terus mendukung program strategi nasional pencegahan korupsi, dengan tiga fokus utama, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara dan daerah, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi," jelas dia. *(sti)*